

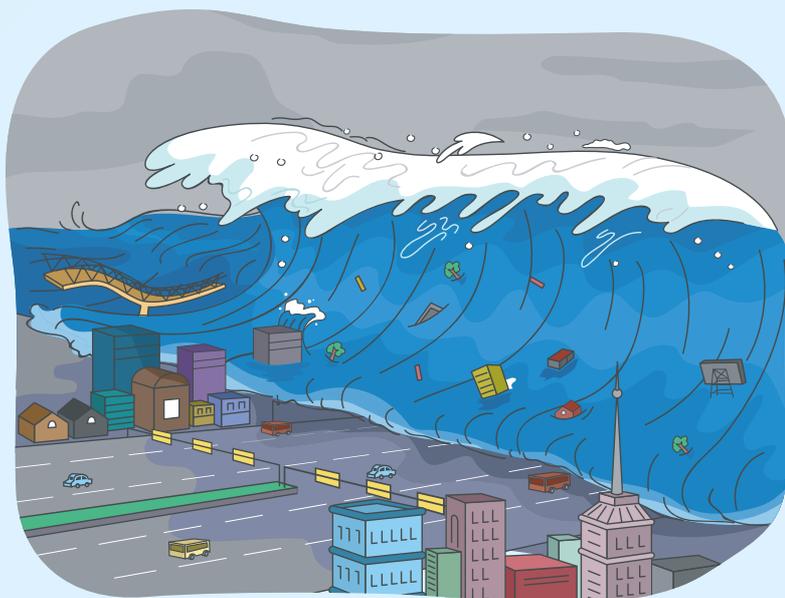
WE ARE IN THE ERA OF LOSS AND DAMAGE

Oleh: Doddy S. Sukadri[1] dan Farhan Helmy[2]



1. Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Hijau, Mantan Negosiator COP-UNFCCC, Pengamat Perubahan Iklim.
2. Presiden DILANS Indonesia, Kepala Sekolah ‘the Thamrin School of Climate Change and Sustainability’, Mantan Negosiator COP-UNFCCC

Pernahkan anda membayangkan sebuah pulau kecil yang tenggelam karena kenaikan permukaan air laut?



Pemanasan global

Pemanasan global telah menyebabkan suhu air laut meningkat dan mencairkan es yang berada di kutub. Akibatnya volume air laut naik dan akhirnya menenggelamkan daratan. Seluruh sendi kehidupan, termasuk makhluk hidup, warisan budaya, dan peradaban manusia semuanya lenyap seketika. Itulah salah satu dampak terburuk yang akan terjadi akibat perubahan iklim.

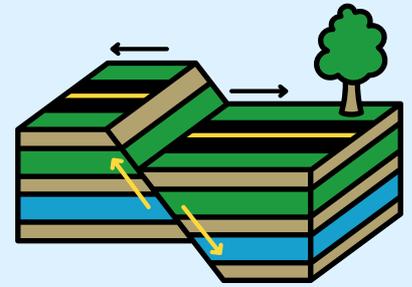
Perubahan Iklim

menimbulkan dampak negatif yang substansial terhadap ekosistem, infrastruktur, serta kesehatan dan mata pencaharian masyarakat di seluruh dunia. Kehilangan material dan kerusakan ekosistem, infrastruktur, dll menjadi prioritas bagi banyak negara yang rentan terhadap perubahan iklim dalam Conference of the Parties - United Nations Framework Convention on Climate Change (COP-UNFCCC) karena dampak peru



Untuk banyak negara kepulauan kecil, dampak tersebut menimbulkan ancaman eksistensial. Contoh cerita seperti ini dalam negosiasi perubahan iklim dikenal dengan istilah: Loss and Damage (kehilangan dan kerusakan).

Yang perlu dipahami adalah bahwa dampak perubahan iklim sifatnya permanen (tidak dapat dipulihkan – irrecoverable), sehingga tidak bisa merubah keadaan kembali seperti semula.



Menurut laporan United Nations Environment Program (UNEP) tahun 2022, hampir separuh bencana alam yang terjadi di muka bumi merupakan bencana iklim.



- Kebakaran hutan yang hebat tahun 2022 yang lalu di Amerika dan Kanada adalah akibat gelombang panas yang panjang di belahan bumi utara;
- Kekeringan yang bertahun-tahun mengancam kelaparan berskala luas di Afrika
- Banjir bandang di Pakistan telah berdampak terhadap
- 30 juta warganya



Selama lima puluh tahun terakhir bencana yang terkait dengan krisis iklim di berbagai belahan dunia rata-rata telah menewaskan 115 orang, dan lebih dari 91% terjadi di negara berkembang. Tingkat kerugian dan kerusakan global saat ini sebenarnya sulit dihitung, namun ditaksir tidak kurang dari USD 200 juta setiap harinya. Selama kurun waktu 1970 – 2019, lebih dari 11 ribu bencana iklim telah terjadi di dunia. Hal ini telah menyebabkan lebih dari dua juta kematian dan kerugian finansial sebesar USD 3,64 triliun.

>90% BENCANA DI INDONESIA

Diakibatkan oleh bencana meteorologi (termasuk banjir dan tanah longsor) akibat krisis iklim. Hasil kajian Bappenas menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat krisis iklim sebesar Rp 544T selama 2020 - 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% adalah akibat kerusakan pantai dan pesisir; dan sisanya adalah kerugian akibat turunnya produksi pertanian (beras), kesehatan, dan penyediaan air bersih.



Negosiasi Global

Isu Loss and Damage (LD) telah lama dibicarakan, yaitu sejak negosiasi perubahan iklim PBB tahun 1991. Ketika itu Vanuatu yang mewakili negara-negara kepulauan yang bernaung di bawah AOSIS (Association of Small Island Countries) mengusulkan pembentukan suatu skim asuransi untuk negara-negara yang berpotensi tenggelam karena kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global dan perubahan iklim.

Negosiasi global tentang LD selama ini dianggap kurang “fair” menurut negara-negara berkembang. Maladewa, misalnya, hanya menyumbang 0,03 persen dari emisi gas rumah kaca global, tetapi kenaikan permukaan laut merupakan ancaman nyata bagi negara itu karena empat per lima pulaunya hanya satu meter di atas permukaan laut.



Demikian pula seluruh benua Afrika hanya menyumbang 3,8 persen terhadap emisi gas rumah kaca global, namun benua ini paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan sejak lama sudah menderita kerugian dan kerusakan yang parah. Politisi dan pemangku kepentingan masyarakat sipil di beberapa negara berkembang telah menyoroti tanggung jawab negara maju dalam menyebabkan perubahan iklim dan meminta mereka untuk memberikan kompensasi atas kerugian dan kerusakan.

LD mendapatkan momentumnya pada tahun 2013 ketika Para Pihak setuju untuk membentuk Mekanisme Internasional Warsaw untuk Kerugian dan Kerusakan yang terkait dengan Dampak Perubahan Iklim (Warsawa International Mechanism -WIM). Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi dialog, mengisi kesenjangan pengetahuan, dan meningkatkan tindakan dan dukungan bagi negara-negara yang mengalami kerugian dan kerusakan.



Pada COP-25 di Madrid tahun 2019, Para Pihak sepakat untuk membentuk 'Santiago Network' on Loss and Damage untuk menjembatani negara-negara berkembang dengan negara-negara maju dan lembaga internasional pemberi bantuan/pinjaman untuk pembangunan. Dalam COP-26 di Glasgow tahun 2022 lalu, LD mendapat perhatian yang cukup besar.



'Pakta Iklim Glasgow' pada akhirnya memasukkan bagian khusus tentang LD dan mendesak negara maju dan lembaga-lembaga bantuan internasional untuk memberikan bantuan yang lebih banyak untuk kegiatan yang terkait dengan LD. Para Pihak sepakat untuk mengadakan dialog untuk membahas pengaturan pendanaan kegiatan guna mencegah, meminimalkan, dan mengatasi kerugian dan kerusakan yang terkait dengan dampak buruk perubahan iklim. 'Dialog Glasgow' ini akan berlangsung hingga Juni 2024.



Dalam COP-27 di Sharm el-Sheikh bulan Desember tahun lalu Para Pihak akhirnya menyepakati mekanisme pendanaan untuk Loss and Damage (LD) akibat eskalasi bencana iklim di berbagai belahan dunia belakangan ini. Para Pihak baru menyadari pentingnya hal ini ditangani segera dan secara bersama-sama.



APA YANG PERLU KITA LAKUKAN?

Kesepakatan COP-27 untuk membuat mekanisme pendanaan LD adalah bersejarah. Ini adalah sesuatu yang telah diupayakan oleh negara-negara berkembang yang rentan terhadap iklim selama beberapa dekade, tetapi tidak didukung oleh negara-negara maju. Namun demikian belum diputuskan di mana dana akan ditempatkan, di dalam atau di luar kewenangan UNFCCC?, **jenis kegiatan apa yang akan didukungnya?, bagaimana pengelolaannya?, negara mana yang memenuhi syarat untuk menerima dukungan?, dan siapa yang akan berkontribusi secara finansial.**

Pada COP-27, Para Pihak sepakat untuk membentuk 'komite transisi' yang akan melihat masalah ini lebih mendalam, dan akan membuat rekomendasi untuk Para Pihak untuk dipertimbangkan pada COP-28 tahun ini di Abu Dhabi.

Pemerintah Indonesia sebaiknya memanfaatkan peluang tersedianya pendanaan ini dengan mengkaji ulang komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) yang lebih terfokus pada upaya mitigasi. LD haruslah dijadikan sebagai penyangga manakala berbagai upaya mitigasi terkendala dengan dinamika global yang tidak menentu

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan LD seperti Bappenas, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PUPR perlu segera mengambil inisiatif untuk menginisiasi upaya ini.

Dialog LD yang transparan dan partisipatif melibatkan state dan non-state actors perlu segera dilakukan terutama di berbagai kawasan yang diidentifikasi akan berdampak pada lebih dari 50 juta orang penduduk yang tinggal di kawasan pesisir (Bappenas, 2021). Termasuk juga di kawasan lainnya yang rentan karena siklus hidrologi yang terganggu (banjir, longsor). Tata kelola dan kelembagaan pemerintahan sudah harus berujung pada intervensi teknis untuk menyelesaikan persoalan di tingkat tapak.

Selain itu perlu mengidentifikasi langkah-langkah yang realistis secara politik yang dapat diambil dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk membangun visi bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders termasuk kaum disabilitas, karena kelompok ini merupakan yang paling rentan terkena dampak LD. Kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024 harus juga menunjukkan perhatian yang serius pada masalah ini sebagai agenda pada siapapun yang akan diberi mandat untuk menjalankannya nanti.

Sebuah strategi yang adaptif perlu dibuat dan dikembangkan bersama-sama untuk menghadapi dampak bencana iklim yang diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

